



DIPLOMASI PERTAHANAN DI PERBATASAN: POTENSI DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA DAN VIETNAM

Ario Rizky Pratama, Rizerius Eko Hadisancoko,

Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang

Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan lanskap diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Vietnam. Peningkatan ekonomi dan tantangan keamanan di wilayah ini, termasuk sengketa wilayah dan ancaman terorisme, memerlukan kemampuan pertahanan yang kuat dan inisiatif diplomasi yang kokoh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mencari pemahaman komprehensif tentang berbagai fenomena dan realitas sosial. Peneliti menemukan bahwa potensi dalam diplomasi pertahanan yang dapat dicapai oleh kedua negara termasuk kerjasama maritim, inisiatif keamanan regional, dan kolaborasi teknologi pertahanan, sementara tantangan dalam diplomasi pertahanan berasal dari situasi kompleks di Laut China Selatan, yang ditandai oleh sengketa wilayah dan ketegangan geopolitik. Menyeimbangkan kepentingan nasional sambil menavigasi dinamika rumit ini memerlukan kefasihan diplomatis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi pertahanan menawarkan jalan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan, meningkatkan keamanan regional, dan berkontribusi pada Asia Tenggara yang damai.

Kata Kunci: Indonesia, Vietnam, Diplomasi Pertahanan, Kerjasama Pertahanan, Kebijakan Pertahanan.

PENDAHULUAN

Kepentingan strategis Asia Tenggara telah berkembang secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh pembangunan

ekonomi, jalur perdagangan maritim, dan rivalitas geopolitik. Kawasan ini telah muncul sebagai kekuatan ekonomi, mengalami perkembangan yang cepat dan berkelanjutan selama beberapa

dekade terakhir (Kuusinen et al., 2020; Vinayak et al., 2014). Beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pasar yang berkembang, membentuk lanskap ekonomi yang dinamis dan tangguh (Kominfo, 2023). Peningkatan ekonomi di wilayah ini tidak hanya meningkatkan standar hidup tetapi juga menarik investasi langsung asing yang substansial, menjadikan Asia Tenggara sebagai pemain kunci dalam arena ekonomi global (Thomsen, 1999).

Keberadaan strategis wilayah ini erat kaitannya dengan keharusan menjaga keamanan dan stabilitas. Asia Tenggara menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk sengketa wilayah, kejahatan lintas batas, dan ancaman terorisme (Ruland, 2004). Sebagai hasilnya, negara-negara di wilayah ini, bersama dengan aktor eksternal, terpaksa untuk berinvestasi dalam kemampuan pertahanan dan terlibat dalam inisiatif diplomasi untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam hubungan mereka dengan Tiongkok dalam konteks Laut China Selatan (LCS) (Huang & Billo, 2015). Di sisi lain, Indonesia mengalami tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam.

Tumpang tindih ZEE ini telah menyebabkan sengketa wilayah sesekali antara Indonesia dan Vietnam. Perundingan tentang batas maritim antara Indonesia dan Vietnam dimulai pada 5 Juni 1978, berakhir pada 26 Juni 2003, menghasilkan "Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Shelf Kontinental, 2003." Periode perundingan yang diperpanjang disebabkan oleh interpretasi yang berbeda antara kedua negara mengenai isu teknis dan

metodologi untuk menetapkan garis dasar pulau-pulau. Awalnya, Vietnam menyarankan untuk menyelaraskan batas ZEE dengan batas Shelf Kontinental melalui proposal "garis tunggal," yang ditolak oleh Indonesia, dengan alasan sifat yang berbeda dari rezim maritim yang mengatur batas ZEE dan Shelf Kontinental. Tantangan dalam penetapan batas ini terutama terlihat di daerah yang kaya sumber daya, di mana kedua negara berusaha mengukuhkan hak berdaulat mereka atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak, gas, dan perikanan (Ayu et al., 2021).

Dalam konteks ini, Indonesia dan Vietnam semakin menyadari pentingnya diplomasi pertahanan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri mereka. Kesadaran yang meningkat terhadap masalah keamanan regional dan global mendorong Indonesia dan Vietnam untuk aktif terlibat dalam diplomasi pertahanan. Letak strategis Asia Tenggara, ditambah dengan rivalitas geopolitik dan ancaman keamanan yang berkelanjutan, menekankan perlunya langkah-langkah proaktif untuk memastikan stabilitas. Dengan mengintegrasikan diplomasi ke dalam kerangka kebijakan luar negeri mereka, kedua negara berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perbatasan antara kedua negara (Belo et al., 2020).

Pentingnya diplomasi pertahanan di pemerintahan Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Prabowo Subianto, menekankan pentingnya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan perselisihan antarnegara, bersamaan dengan ketaatan pada aturan hukum dalam penanganan konflik, saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang (Biro Humas Setjen Kemhan, 2021). Pada tahun 2022, Prabowo Subianto menyatakan niatnya untuk meningkatkan potensi kolaborasi

Indonesia dan Vietnam dalam industri pertahanan sebagai bagian dari inisiatif diplomasi pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2022). "Kolaborasi industri pertahanan diharapkan dapat melampaui misi jual-beli semata, tetapi merambah ke potensi kedua negara untuk terlibat dalam Produksi Bersama di masa depan," ungkap Menteri Prabowo Subianto. Di pihak lain, Vietnam melihat diplomasi pertahanan sebagai bagian dari diplomasi negara. Tujuan diplomasi pertahanan adalah untuk memajukan dan meningkatkan hubungan pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati (Kementerian Pertahanan Vietnam, 2019).

Dalam konteks pentingnya strategis wilayah perbatasan atau batas bersama di Laut Natuna Utara, Indonesia dan Vietnam mendapati diri mereka menghadapi tantangan dalam penetapan wilayah. Kompleksitas seputar penetapan wilayah masing-masing telah mendorong ketergantungan pada diplomasi pertahanan sebagai alternatif strategis. Ini berfungsi sebagai sarana krusial bukan hanya untuk mengurangi konflik potensial tetapi juga untuk membina kepercayaan dan mendorong militerisasi bersama. Secara khusus, peneliti akan berfokus pada menganalisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Vietnam di wilayah perbatasan. Penelitian ini akan lebih lanjut menyelidiki kompleksitas diplomasi pertahanan, menawarkan eksplorasi menyeluruh terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi baik Indonesia maupun Vietnam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mencari pemahaman komprehensif tentang berbagai fenomena dan realitas sosial. Pendekatan kualitatif menekankan logika induktif, di mana kategori

dikembangkan melalui analisis data yang ditemukan secara daring dan interaksi antara peneliti dengan informan di lapangan. Akibatnya, penelitian kualitatif menghasilkan informasi kontekstual yang membantu mengidentifikasi pola atau teori yang menjelaskan fenomena sosial.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengadopsi pendekatan desain studi kasus. Menurut Creswell, pendekatan studi kasus melibatkan penyelidikan satu kasus atau pemeriksaan isu atau masalah tertentu, menggunakan kasus tersebut sebagai ilustrasi khusus (Creswell, 2009). Penelitian ini akan mendalami situasi nyata, mencakup kasus-kasus relevan, dan memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk pengumpulan data. Kasus yang sedang diteliti berkaitan dengan kerjasama pertahanan dan upaya industri dalam kerangka diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Vietnam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Vietnam

Kebijakan pertahanan, dalam arti umum, mencakup pendekatan strategis suatu negara untuk menjaga kedaulatannya, melindungi warganya, dan menjaga keamanan nasional. Dalam konteks yang lebih rinci, kebijakan pertahanan sejalan dengan tantangan yang ditetapkan untuk sektor pertahanan sesuai dengan kebijakan nasional (Neill et al., 2017). Pembentukan kebijakan pertahanan melibatkan penilaian komprehensif terhadap ancaman potensial, baik internal maupun eksternal, dan pengembangan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Hal tersebut mencakup keputusan tentang kemampuan militer, struktur kekuatan, pengumpulan intelijen, dan inisiatif diplomasi. Tujuan utamanya sering

melibatkan upaya pencegahan, kemampuan untuk merespons agresi, dan memastikan ketahanan infrastruktur kritis (Magnani & Barreto, 2022).

Kebijakan pertahanan Indonesia berakar dalam kebijakan luar negeri nasional yang lebih luas, yaitu nonblok dan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Sejalan dengan ini, Indonesia sedang menerapkan strategi "Flexible hedging strategy" dalam kerangka kebijakan luar negerinya (Abrar & Syauqi, 2019). Pendekatan ini ditujukan kepada Amerika Serikat dan Tiongkok, mencakup kebijakan pertahanan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip bangsa. Kebijakan ini mengharapkan agar keseimbangan tetap terjaga dalam spektrum dinamika kekuatan, sesuai dengan prinsip-prinsip bebas dan aktif.

Indonesia menyadari bahwa posisi geografis strategis dan sumber daya alam yang melimpah dapat menarik kekuatan global utama yang mencari aliansinya (Yoshimatsu, 2022). Namun, Indonesia harus mengetahui konsekuensi yang serius yang mungkin timbul dari bersekutu dengan kekuatan tertentu, para pemimpin pendiri Indonesia menganjurkan kebijakan luar negeri yang mencerminkan sikap bangsa yang independen namun terlibat dalam perdamaian global (Haryanto, 2014).

Komitmen Indonesia terhadap nonblok tidak hanya sebatas mengelola rivalitas Sino-Amerika; melibatkan juga menjaga kemitraan keamanan seimbang dengan berbagai negara (Sukmawan & Pedrason, 2023). Keadaan ini melibatkan tidak hanya negara-negara yang terkait dengan Amerika Serikat, seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, Prancis, dan Britania Raya, tetapi juga menekankan keterlibatan dengan spektrum luas sekutu dan mitra internasional. Indonesia tetap teguh

dalam dedikasinya terhadap nonblok, aktif menggunakan upaya diplomatis untuk menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya, terutama antara AS dan Tiongkok (Haryanto, 2014). Indonesia menyadari akan kenaikan Tiongkok yang tak terelakkan dan menganggap keterlibatan dengan Tiongkok bukan hanya sebagai langkah yang memungkinkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dihadapkan dengan pilihan strategis yang terbatas, Indonesia memprioritaskan pendekatan berpusat pada ASEAN untuk mengelola persaingan regional sambil mendukung partisipasi internasional yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN mempromosikan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP), yang menekankan inklusivitas, pembangunan ekonomi, dan konektivitas, dengan tujuan meredakan ketegangan antara kekuatan besar di kawasan (Pangestu et al., 2021). Negara-negara anggota ASEAN memilih pendekatan yang lebih konstruktif dalam membangun hubungan, menjauh dari dinamika permusuhan yang dapat memicu ketidakstabilan dan ketidakamanan di kawasan.

Di sisi lain, Vietnam utamanya menggunakan kombinasi pemeriksaan dan keseimbangan yang ketat, pemeriksaan dan keseimbangan halus, keterlibatan langsung, dan pertimbangan ekonomi praktis dalam membentuk dan menyempurnakan strategi dan kebijakan pertahannya (Sangtam, 2021). Kebijakan pertahanan Vietnam mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan militer, menggunakan negosiasi politik untuk menangani perselisihan regional dan menekankan pengembangan militer yang kuat. Dengan kemajuan inovasi dan peningkatan kekuatan nasional secara keseluruhan, Vietnam semakin fokus pada peningkatan kemampuan senjata

dan memperjuangkan konsep "pertahanan nasional untuk semua" (FAN Yazhen, 2022).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Vietnam beralih fokus kebijakan luar negerinya untuk menjaga kepentingan di Asia Tenggara dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan Laut China Selatan. Pendekatan terhadap ASEAN perlahan berubah setelah Hanoi menjadi anggota penuh pada tahun 1995. Pendekatan terhadap ASEAN secara perlahan berubah setelah Hanoi memperoleh keanggotaan penuh pada tahun 1995. Kontribusi Vietnam terhadap "ASEAN way" dianggap sebagai sarana untuk mengatasi ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan, memberikan negara tersebut daya ungu dan posisi tawar melawan Tiongkok (Sangtam, 2021).

Vietnam menerapkan strategi pertahanan nasional yang "komprehensif" dan "universal", dengan menekankan kemajuan terpadu dalam dimensi militer, politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Undang-Undang Pertahanan Nasional Vietnam (Kementerian Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam, 2019), anggaran pertahanan nasional memberikan prioritas pada investasi di wilayah perbatasan, pulau-pulau, zona strategis yang diutamakan, dan benteng pertahanan, bersama dengan beberapa unit yang termodernisasi dari tentara rakyat. Undang-undang ini juga menguraikan kebijakan khusus untuk pertahanan nasional di wilayah perbatasan, pulau-pulau, zona strategis yang diutamakan, dan benteng pertahanan sambil memastikan perlindungan kepentingan pertahanan nasional di ranah ekonomi, sosial, dan luar negeri.

Baru-baru ini, terjadi pergeseran yang mencolok menuju prioritas "masalah keamanan non-tradisional" dalam kerja sama pertahanan dan

keamanan Vietnam, baik secara regional maupun global (Sangtam, 2021). Bagian awal Laporan Pertahanan Vietnam tahun 2019 menekankan tren ini, dengan menyoroti "keamanan non-tradisional" sebanyak lima kali dalam analisis konteks strategis. Penyebutan sering mengenai masalah keamanan non-tradisional, termasuk kekhawatiran iklim, terorisme, dan serangan siber, menunjukkan bahwa Vietnam sekarang menempatkan penekanan signifikan pada masalah ini dalam persepsi ancaman pertahanannya.

Potensi dalam Diplomasi Pertahanan antara Indonesia dan Vietnam

1. Kerjasama Maritim

Salah satu fokus utama selama Kepemimpinan ASEAN Indonesia pada tahun 2023 adalah kemajuan kerjasama maritim, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN, Rolliansyah Soemirat (Vietnam News Agency, 2023b). Indonesia dan Vietnam memiliki prospek untuk mempererat kerjasama keamanan maritim melalui pelaksanaan patroli bersama secara reguler di Laut China Selatan. Selama kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Vietnam pada tahun 2022, Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, juga mengusulkan agar kedua negara bekerja sama lebih erat untuk mengatasi masalah maritim, khususnya dalam menciptakan mekanisme yang sistematis dan tepat waktu untuk menangani masalah yang muncul (Kementerian Pertahanan, 2022). Indonesia dan Vietnam setuju untuk meningkatkan kerjasama dengan Angkatan Laut dan penjaga pantai Vietnam untuk bersama-sama mengatasi isu-isu maritim.

Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan kejahatan maritim lainnya. Di

luar manfaat yang nyata dalam meningkatkan keamanan maritim, patroli bersama maritim berfungsi sebagai saluran untuk membangun kepercayaan dan pemahaman antara kekuatan angkatan laut kedua negara. Melalui operasi bersama dan respons yang terkoordinasi, Indonesia dan Vietnam dapat membentuk dasar kerja sama yang berkontribusi pada stabilitas dan keamanan keseluruhan lingkungan maritim yang mereka bagi (David, 2024).

Aspek penting dari keamanan maritim yang efektif adalah pembentukan mekanisme yang kuat untuk berbagi informasi kesadaran domain maritim. Indonesia dan Vietnam dapat meningkatkan kemampuan bersama mereka untuk melacak dan merespons ancaman regional dengan memfasilitasi pertukaran informasi vital. Pendekatan kolaboratif ini memastikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang domain maritim, memungkinkan kedua negara untuk segera dan efektif mengatasi tantangan yang muncul. Pendirian kerangka berbagi informasi menandai langkah strategis menuju lingkungan maritim yang lebih aman dan bersinergi di wilayah tersebut sehingga kedua negara dapat saling mempercayai satu sama lainnya (David, 2024).

Kolaborasi antara Indonesia dan Vietnam melibatkan inisiatif pembangunan kapasitas untuk penjaga pantai dan agensi perikanan mereka. Upaya kolaboratif ini mencakup program pelatihan yang berfokus pada berbagai aspek, termasuk penegakan hukum maritim, operasi pencarian dan penyelamatan, dan respons polusi. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka, kedua negara dapat meningkatkan kemampuan agensi masing-masing, mendorong respons yang lebih kuat dan terkoordinasi terhadap tantangan maritim. Upaya bersama ini tidak hanya berkontribusi pada kekuatan individu Indonesia dan Vietnam tetapi juga memperkuat

kemampuan bersama mereka untuk melindungi kepentingan maritim dan mempromosikan praktik berkelanjutan (David, 2024).

2. Menciptakan Keamanan Regional

Melampaui patroli bersama dan pertukaran teknologi, diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Vietnam menawarkan jalan yang menjanjikan untuk meningkatkan stabilitas regional. Salah satu jalur tersebut terletak dalam dialog terbuka dan rutin mengenai isu-isu keamanan mendesak, seperti sengketa Laut China Selatan dan ancaman terorisme. Selama kunjungannya pada Januari 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi Vietnam bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas kerjasama maritim dan keamanan di wilayah tersebut (Reuters, 2024).

Sejak tahun 2022, Vietnam telah mengejar strategi untuk meningkatkan hubungannya dengan kekuatan dan mitra global, dan diharapkan akan memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Dengan mengakui kekhawatiran dan bertukar pandangan, kedua negara dapat bekerja menuju pemahaman bersama dan membangun konsensus untuk solusi damai. Pendekatan kolaboratif ini dapat membuka jalan menuju Asia Tenggara yang lebih stabil dan bersatu.

Selain itu, kemitraan pertahanan Indonesia dan Vietnam dapat melampaui kata-kata dan menjadi tindakan nyata. Dengan berkolaborasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan, Indonesia dan Vietnam dapat menerjemahkan komitmen mereka terhadap keamanan regional menjadi kontribusi nyata. Berpartisipasi bersama dalam upaya bantuan bencana atau misi pemeliharaan perdamaian tidak hanya akan bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat tetapi juga akan menunjukkan solidaritas dan tanggung

jawab bersama mereka terhadap kesejahteraan regional. ASEAN-Plus tentang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana pada Oktober 2023, yang melibatkan Indonesia dan Vietnam, dapat menjadi contoh kolaborasi yang akan mengukuhkan peran mereka sebagai pemain kunci dalam memastikan perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara (Vietnam News Agency, 2023a).

Terakhir, keterkaitan pertahanan mereka dapat memberikan kontribusi pada visi lebih luas tentang keamanan regional melalui advokasi bersama terhadap pengendalian senjata dan langkah-langkah pemilihan senjata. Dengan mendorong peningkatan militer yang bertanggung jawab dan mempromosikan transparansi dalam kebijakan pertahanan, Indonesia dan Vietnam dapat membantu mengurangi risiko konflik dan memperkuat kepercayaan di antara negara-negara regional.

Sejauh ini, Indonesia dan Vietnam telah mengadakan dialog kebijakan pertahanan ketiga bersama (Vietnam News Agency, 2023c). Tujuan dari dialog ini adalah mengevaluasi hasil kerjasama pertahanan antara Vietnam dan Indonesia sejak sesi Dialog Kebijakan Pertahanan kedua pada tahun 2021. Selain itu, dialog ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan dan mencapai pemahaman bersama mengenai arah prospektif kerjasama pertahanan. Pendekatan proaktif ini terhadap Asia Tenggara yang lebih damai menegaskan komitmen mereka untuk masa depan di mana keamanan dibangun melalui kerjasama, bukan persaingan. Indonesia dan Vietnam memiliki dasar yang kuat untuk kerjasama pertahanan, dan menjelajahi jalur-jalur ini untuk dialog, tindakan, dan advokasi dapat meningkatkan kemitraan mereka ke tingkat yang baru (David, 2024).

3. Kerjasama Teknologi Pertahanan

Salah satu wadah kolaborasi melibatkan upaya bersama dalam penelitian dan pengembangan. Indonesia dan Vietnam dapat menyatukan keahlian mereka untuk memimpin inisiatif yang bertujuan menciptakan teknologi pertahanan terkini. Selama kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Vietnam, Beliau menyampaikan harapannya bahwa kolaborasi di industri pertahanan tidak hanya terbatas pada misi jual-beli semata, melainkan juga menjelajahi potensi keterlibatan bersama dalam produksi di masa depan (Kementerian Pertahanan, 2022).

Bidang-bidang fokus dapat mencakup pengembangan alat-alat inovatif seperti drone dan sistem pemantauan maritim canggih. Upaya penelitian kolaboratif tidak hanya dapat mempercepat kemajuan teknologi, tetapi juga menghasilkan solusi pertahanan yang lebih solid yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh kedua negara.

Pertukaran keahlian juga merupakan aspek penting lain dari kerjasama teknologi pertahanan. Indonesia dan Vietnam dapat terlibat dalam pertukaran saling berbagi pengetahuan dan kemampuan mereka dalam teknologi dan peralatan pertahanan tertentu. Pendekatan kolaboratif ini memfasilitasi transfer keterampilan yang dinamis, membina hubungan saling mendukung yang meningkatkan kecakapan teknologis kedua negara. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing, Indonesia dan Vietnam dapat bersama-sama meningkatkan kemampuan pertahanan mereka dan tetap selaras dengan tren teknologi yang berkembang.

Mengingat potensi manfaat skala dan pengurangan biaya, Indonesia dan Vietnam juga dapat menjelajahi kelayakan pengadaan bersama untuk

peralatan pertahanan. Dengan menggabungkan daya beli mereka, kedua negara memiliki potensi untuk mendapatkan ekonomi skala, menjadikan pengadaan sistem pertahanan canggih lebih hemat biaya. Inisiatif pengadaan bersama berkontribusi pada optimalisasi sumber daya, memastikan bahwa anggaran pertahanan yang terbatas digunakan secara efisien. Pendekatan kerjasama ini tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia dan Vietnam, tetapi juga membina kemitraan strategis yang sejalan dengan tujuan keamanan bersama mereka (Kementerian Pertahanan, 2022).

Tantangan dalam Diplomasi Pertahanan antara Indonesia dan Vietnam

Laut China Selatan tetap menjadi titik fokus ketegangan geopolitik, menyajikan tantangan signifikan dalam dialog diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Vietnam. Klaim wilayah yang tumpang tindih dan kepentingan strategis dari berbagai negara telah menyebabkan situasi yang kompleks dan memanas. Keberadaan kekuatan besar dan tegasnya dominasi maritim oleh aktor tertentu di wilayah tersebut berkontribusi pada lingkungan yang menuntut navigasi hati-hati dalam upaya diplomasi pertahanan.

Dalam sengketa Laut China Selatan dengan China, bersama dengan negara-negara pemilik klaim lainnya seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam mendominasi di wilayah yang dipertentangkan (Rossiana, 2022). Strategi Vietnam dalam Laut China Selatan, yang dicirikan oleh logika lindung nilai dalam hubungannya dengan China, dapat diartikulasikan sebagai kebijakan "Cooperating and Struggling" (Tran & Sato, 2018). Strategi ini menggunakan pendekatan yang kontradiktif untuk menavigasi kompleksitas sengketa Laut China

Selatan. Sambil menekankan "Cooperating" dengan China dan negara pemilik klaim lainnya untuk meminimalkan ketegangan, Vietnam juga terlibat dalam bentuk "Struggling" dengan mereka untuk melindungi kepentingan intinya (Thayer, 2016). Namun, sejak tahun 2010, Vietnam telah mengembangkan pendekatan strategis yang melibatkan langkah-langkah penyeimbangan, terutama sebagai tanggapan terhadap China. Langkah-langkah ini melibatkan unsur internal dan eksternal, termasuk memperkuat kemampuan militer dan penegakan hukum maritim, memperkuat pos keamanan di Kepulauan Spratly, mempersiapkan diri untuk konfrontasi potensial dengan China, dan memperkuat aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kebijakan dalam sengketa Laut China Selatan yang dapat dipahami lebih khusus sebagai "Balanced Hedging" (Gindarsah, 2017). Klaim wilayah di Laut China Selatan juga berpotensi menjadi tantangan bagi klaim Indonesia sebagai negara kepulauan dan kedaulatannya atas batas-batas wilayah. Secara khusus, terdapat interpretasi peta garis sembilan Cina yang menyiratkan perluasan deliniasi wilayah oleh Beijing yang mungkin mencakup klaim Jakarta terhadap perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Selain itu, kekhawatiran Indonesia secara sentral terkait dengan implikasi Laut China Selatan, terutama terkait Kepulauan Spratly, terhadap kesatuan dan koherensi ASEAN, serta "ASEAN-Way" yang telah terbentuk untuk menyelesaikan konflik melalui cara damai (Majumdar, 2015).

Isu ini, di satu sisi, cenderung menciptakan perpecahan di antara negara-negara pemilik klaim di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam, mengingat klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut

China Selatan. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan ketidaksepakatan antara negara-negara pemilik klaim dan non-pemilik klaim ASEAN, seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Myanmar, mengenai pendekatan yang diinginkan terkait aliansi regional dalam berinteraksi dengan China.

Saat Indonesia dan Vietnam berusaha membentuk langkah-langkah pertahanan yang kolaboratif (Kementerian Pertahanan, 2022), situasi memanas di Laut China Selatan menimbulkan tantangan yang kompleks. Diplomasi pertahanan menjadi suatu cara bagi Indonesia dan Vietnam, masing-masing dengan dinamika hubungan yang unik dengan China. Indonesia dan Vietnam membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang konteks sejarah, nuansa geopolitik saat ini, dan pentingnya menjaga kepentingan nasional sambil mendorong solusi kerjasama.

SIMPULAN

Diplomasi pertahanan memberikan jalan bagi Indonesia dan Vietnam untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan tantangan batas maritim di perairan Natuna Utara. Komitmen terhadap patroli maritim bersama, pertukaran informasi, dan pembangunan kapasitas mencerminkan dedikasi bersama terhadap keamanan dan stabilitas maritim. Upaya kolaboratif ini melampaui hubungan bilateral untuk berkontribusi pada inisiatif keamanan regional.

Keterlibatan aktif dalam pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan advokasi pengendalian senjata serta pencabutan senjata menegaskan komitmen kedua negara untuk memajukan Asia Tenggara yang damai. Kerja sama dalam teknologi pertahanan menawarkan peluang menarik bagi Indonesia dan Vietnam.

Inisiatif penelitian dan pengembangan bersama, transfer teknologi, dan pengadaan bersama memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sambil mengoptimalkan sumber daya.

Namun, tantangan di Laut China Selatan, yang ditandai oleh sengketa wilayah sengit dan ketegangan geopolitik, tetap menjadi hambatan signifikan. Kedua negara harus dengan hati-hati menavigasi kompleksitas ini, menyeimbangkan kepentingan mereka sambil berkontribusi pada stabilitas regional. Kelemahan isu Laut China Selatan, termasuk klaim yang tumpang tindih dan potensi dampak terhadap kesatuan ASEAN, menegaskan perlunya diplomasi pertahanan yang rumit.

DAFTAR PUSTAKA

Data Online:

Abrar, M. I., & Syauqi, M. D. (2019). Hedging Sebagai Strategi Indonesia untuk Menghadapi Klaim Cina di Laut Cina Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Capie, D. (2013). Structures , Shocks and the Late Rise of Asia ' s Norm Change: Explainin Defence Diplomacy. *Contemporary Southeast Asia*, 35(1), 1–26. <https://doi.org/10.1355/cs35-la>

Cotter, A., & Forster, A. (2004). Reshaping defence diplomacy: New roles for military cooperation and assistance. In *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* (pp. 1–84). <https://doi.org/10.4324/9781315000817>

Creswell, J. W. (2009). *Research Design 3rd Ed. In Research Design 3rd Ed (3rd ed.)*. Sage Publications. <https://www.worldcat.org/title/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches/oclc/269313109>

Belo, Z. A., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2020). *KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) DENGAN VIETNAM*.

- Biro Humas Setjen Kemhan. (2021). Menhan Prabowo Tegaskan Mengedepankan Diplomasi dan Dialog dalam Sengketa Antar Negara kepada Menhan Jepang. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Defence Ministry of the Republic of Indonesia. (2015). Indonesian Defence White Paper. In Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
- Dodd, T., & Oakes, M. (1998). The Strategic Defense Review White Paper (RP98/91). House of Commons Library, October, 62.
- FAN Yazhen. (2022). An Analysis of the Adjustment of Vietnam's Defense Policy in Recent Years and Its Causes. *International Relations and Diplomacy*, 10(6), 262-276. <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2022.06.003>
- Gindarsah, I. (2017). Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea. *Maintaining Maritime Order in the Asia-Pacific*, July 2010, 25-36.
- Huang, J., & Billo, A. (2015). Territorial Disputes in the South China Sea.
- Kementerian Pertahanan. (2022). Indonesia dan Vietnam tingkatkan Kerjasama Pertahanan. *WIRA Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 6-8.
- Kominfo. (2023). ASEAN's Role in International Cooperation. ASEAN Indonesia 2023. <https://asean2023.id/en/news/aseans-role-in-international-cooperation>
- Kuusinen, M., Pierzynowski, K., & Yuson, G. (2020). The Rise of the Southeast Asian Tiger. *Business Sweden*, 2, 1-20.
- Magnani, E., & Barreto, M. L. (2022). Defense policy shaping foreign policy. An alternative interpretation through the study of the Argentine-Chilean Relations. *Relaciones Internacionales*, 95(1), 103-125. <https://doi.org/10.15359/ri.95-1.4>
- Majumdar, M. (2015). The ASEAN Way of conflict management in the South China Sea. *Strategic Analysis*, 39(1), 73-87. <https://doi.org/10.1080/09700161.2014.980545>
- Neill, M., Taliaferro, A. C., Tillman, M. E., Morgan, G. D., & Hinkle, W. P. (2017). Defense Governance and Management. In *Institute for Defense Analyses*.
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. (PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)), 26(1), 1. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v26i1.2619>
- Reuters. (2024). Jokowi visits Vietnam to talk South China Sea security and trade. *The Jakarta Post*, 1-8. <https://www.thejakartapost.com/world/2024/01/12/jokowi-visits-vietnam-to-talk-south-china-sea-security-trade.html>
- Rossiana, Y. S. (2022). The South China Sea Dispute: Code of Conduct Implementation as the Dispute Settlement. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 15-30. <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.884>
- Ruland, J. (2004). The Nature of Southeast Asian Security Challenges. December, 13-15.
- Sangtam, A. (2021). Vietnam's strategic engagement in the South China Sea. *Maritime Affairs*, 17(1), 41-57. <https://doi.org/10.1080/09733159.2021.1939868>
- Socialist Republic of Vietnam Ministry of National Defence. (2019). 2019 Vietnam National Defence White Paper. In National Political Publishing House (Vol. 53, Issue 9). <http://www.mod.gov.vn/wps/wcm/connect/08963129-c9cf-4c86-9b5c-81a9e2b14455/2019VietnamNationalDefence.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=08963129-c9cf-4c86-9b5c-81a9e2b14455>
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2023). Assertively Hedging? Indonesia's Motives and Practices in the South China Sea. *Interstemic: Journal of International Studies*, 7(2), 701. <https://doi.org/10.24198/interstemic.v7n2.15>
- Thayer, C. A. (2016). Vietnam's Strategy of 'Cooperating and Struggling' with China over Maritime Disputes in the South China Sea. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 3(2), 200-220. <https://doi.org/10.1177/2347797016645453>
- Thomsen, S. (1999). The role of foreign direct investment policies in development. In

OECD working papers on international investment (Vol. 01).

Tran, T. B., & Sato, Y. (2018). Vietnam's Post-Cold War Hedging Strategy: A Changing Mix of Realist and Liberal Ingredients. *Asian Politics and Policy*, 10(1), 73–99.
<https://doi.org/10.1111/aspp.12368>

Vietnam News Agency. (2023a). ASEAN-Plus nations hold exercises on humanitarian assistance, disaster relief. *Vietnam Plus*, 1. <https://en.vietnamplus.vn/aseanplus-nations-hold-exercises-on-humanitarian-assistance-disaster-relief/269703.vnp>

Vietnam News Agency. (2023b). Indonesia enhances comprehensive ASEAN maritime cooperation. *Vietnam Plus*, 024, 1–4.

Vietnam News Agency. (2023c). Vietnam and Indonesia hold 3rd defense policy dialogue. *Vietnam News*.

Vinayak, H., Thompson, F., & Tonby, O. (2014). *Understanding ASEAN: Seven things you need to know*. McKinsey&Company, 2013(Exhibit 1), 1–8.
<http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know>

Data Wawancara:

A, Albertus Y. D. (2024). Wawancara terkait Isu Laut Natuna Utara dan CBM antara Indonesia dan Vietnam. (Hasil Wawancara Pribadi): 15-Januari-2024, Kersin Mabes TNI.